

## IBI Sleman Miliki Gedung Sekretariat



KR-Istimewa

**Bupati meninjau gedung sekretariat IBI Sleman.**

**SLEMAN (KR)** - Ikatan Badan Indonesia (IBI) Kabupaten Slema sekarang memiliki gedung sekretariat sendiri. Gedung yang berlokasi di Jalan Pandowoharjo No 70 Sleman tersebut diresmikan oleh Bupati Kustini SP, Rabu (18/8), sekaligus memperingati HUT ke-70 IBI.

Ketua IBI Kabupaten

Sleman Siti Purwanti mengatakan, gedung yang menempati tanah seluas 250 meter persegi dengan luas bangunan tahap satu sebesar 165 meter persegi tersebut merupakan hasil dari dana swadaya anggota. "Rencana masih ada lanjutan pembangunan supaya dapat menampung perwakilan ranting karena kita memiliki 10 ranting dan

satu unit badan delima," ujarnya.

Menurutnya, dengan adanya gedung ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara optimal dengan digunakan sebagai peningkatan koordinasi antar pengurus dan anggota. "Gedung ini juga akan difungsikan sebagai pusat koordinasi pengabdian masyarakat," tambah Siti.

Sementara Bupati Kustini berharap dengan adanya gedung sekretariat ini menjadi pijakan awal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan optimal. "Dalam melawan Covid-19, IBI peran sertanya tinggi di Sleman dan penanggulangan Covid-19 tanpa bantuan IBI tidak bisa optimal karena *panjengnan* adalah garda terdepan," ujarnya. **(Has)-f**

## BANTU PETANI, DIGELAR BAZAR BUAH LOKAL

# Konsumsi Warga Masih di Bawah Standar WHO

**SLEMAN (KR)** - Sektor pertanian telah menjadi salah satu faktor yang bisa menjaga stabilitas ekonomi di saat pandemi Covid-19. Berbagai upaya dilakukan pemerintah baik pusat maupun daerah untuk membantu petani menghadapi dampak pandemi tersebut.

Salah satunya dilakukan oleh Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan (DP3) Kabupaten Sleman melalui kegiatan fasilitasi pembelian produk hortikultura yang dialokasikan melalui anggaran tugas pembantuan tahun 2021.

"Kegiatan pembelian diarahkan untuk membeli buah-buahan hasil produksi petani di Kabupaten Sleman yang di masa pandemi masih dapat berproduksi dengan baik. Berbertepatan dengan suasana perayaan Kemerdekaan RI dan Gelar Buah Nusantara Tahun 2021, hasil pembelian buah-buahan tersebut didistribusikan ke-

da masyarakat yang terkena dampak pandemi, masyarakat yang tengah mengalami isolasi mandiri, tenaga kesehatan serta keluarga miskin lainnya," ungkap Kepala DP3 Sleman Suparmono kepada *KR*, Rabu (18/8).

Gerakan ini ditandai dengan penyerahan secara simbolis 150 paket buah-buahan kepada Kalurahan Tridadi untuk warga isolasi mandiri, paket buah-buahan untuk tenaga kesehatan di RSUD Sleman dan RSUD Prambanan dan paket buah-buahan beserta bahan pendukung kesehatan khusus untuk Panti Asuhan Khodijah oleh Bupati Sleman Kustini SP.

Ditambahkan, Gelar Buah Nusantara dilaksanakan pada bulan Agustus baik di tingkat nasional maupun daerah. Di Kabupaten Sleman, selain pelaksanaan gerakan berbagi bantuan buah-buahan, rangkaian kegiatan lainnya seperti adanya Surat Edaran Bupati tentang Gelar Buah Nusantara dan Bazar Buah Lokal unggulan seperti salak pondoh, kelengkeng, belimbing dan jambu.

"Diharapkan dengan adanya potensi ini, konsumsi masyarakat Sleman terhadap buah-buahan dapat meningkat. Rata-rata konsumsi buah di Sleman berdasarkan angka sementara saat ini adalah 87 gram/kapita/hari. Angka konsumsi ini masih di bawah dari batas minimal angka kecukupan gizi Badan Kesehatan Dunia (WHO) yang merekomendasikan konsumsi buah sebesar 150 gram/kapita/hari," jelas Suparmono. **(Has)-f**

## Tiga Padukuhan Dapat Bantuan APD

**GAMPING (KR)** - Pemkab Sleman menyerahkan bantuan Alat Pelindung Diri (APD) dalam rangka penanggulangan Covid-19 untuk Padukuhan Kronggahan, Baturan dan Biru Kalurahan Trihanggo Gamping, Rabu (18/8). Penyerahan dilakukan langsung oleh Wakil Bupati Danang Maharsa.

"Pemkab menyerahkan bantuan APD kepada Satgas Covid-19 di wilayah Kalurahan Trihanggo. Penyaluran bantuan APD ini sesuai dengan permintaan dari Satgas Covid-19 tingkat Padukuhan dalam rangka penanggulangan Covid-19," jelas Danang.

Selain APD, bantuan lain yang diserahkan terdiri dari sanitizer, masker dan disinfektan. "Masing-masing Padukuhan mendapatkan

bantuan 5 APD, 5 sanitizer 125 ml, 10 box masker dan 2 dirigen disinfektan," jelas Danang.

Sementara Dukuh Biru Wartini mengatakan, bantuan dari Pemkab Sleman akan dimanfaatkan untuk gerakan pencegahan oleh Satgas Covid-19. "Saat ini

upaya pencegahan penyebaran Covid-19 terus dilakukan bersama dengan masyarakat serta terus melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat dan penyemprotan lingkungan. Di wilayah kami saat ini terdapat 6 warga yang isoman," sebutnya. **(Has)-f**



KR-Istimewa

**Wabup Danang menyerahkan bantuan dari Pemkab Sleman.**

## MASIH BANYAK WARGA TAKUT

# Dewan Dorong Dinkes Edukasi Vaksin AstraZeneca

**NGAGLIK (KR)** - DPRD Sleman mendorong Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Sleman mengedukasi masyarakat tentang vaksin AstraZeneca. Mengingat sampai saat ini masih banyak warga yang takut disuntik vaksin AstraZeneca.

Ketua Fraksi PKB DPRD Sleman Rahayu Widi Nur-yani SH MH didampingi Rahayu Widi Chahyani SH MM mengatakan, banyak warga yang masih ragu tentang vaksin AstraZeneca. Akibatnya banyak yang takut disuntik AstraZeneca.

"Mereka takut efek setelah disuntik vaksin AstraZeneca. Tentu ini akan menghambat program vaksinasi dari pemerintah," katanya di sela kegiatan vaksinasi massal di Klinik Damai Sejahtera Jalan



KR-Saifulah Nur Ichwan

**Nunung dan Yuyun saat memantau pelaksanaan vaksinasi massal.**

Damai, Rabu (18/8).

Untuk itu, Fraksi PKB mendorong Dinkes Sleman melakukan edukasi tentang vaksin AstraZeneca. Bahwa vaksin tersebut aman bagi masyarakat dalam mencapai kekebalan tubuh untuk melawan virus Korona. "Kami ingin Dinkes aktif melakukan edukasi, bahwa vak-

sin AstraZeneca aman untuk masyarakat," pintanya.

Mengenai kegiatan itu, perempuan yang kerap dipanggil Nunung menjelaskan, vaksin massal itu ditargetkan 1.500 orang. Kegiatan itu kerja sama anggota DPR RI H Sukanto SH, DPC PKB Sleman, Asklin dan PKFI Cabang

Sleman, serta Dinkes Sleman. "Kegiatan ini dalam rangka membantu pemerintah untuk percepatan vaksinasi. Untuk hari ini, khusus warga Depok, Berbah, Mlati dan Gamping. Sedangkan dua hari sebelumnya untuk masyarakat se-DIY," jelasnya.

Jika nanti masyarakat sudah divaksin, diharapkan bisa segera tercapai 'herd immunity' sehingga pandemi cepat berakhir dan masyarakat aman serta sehat. Meskipun demikian, masyarakat tetap diminta untuk menerapkan protokol kesehatan. "Meski sudah divaksin, harus tetap menjaga protokol kesehatan. Soalnya itu untuk menjaga diri sendiri maupun orang lain dari Covid-19," imbauanya. **(Sni)-f**



# DPRD KABUPATEN SLEMAN SUARA WAKIL RAKYAT

Jl. Parasmya, Tridadi, Sleman, DIY Kode Pos 55511. Telp. (0274)868413, Fax (0274)868413

## PANSUS PENYELENGGARAAN PKB

### Memberi Kemudahan Layanan Masyarakat Berbasis Online

**SLEMAN (KR)** - DPRD Sleman telah membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk membahas rancangan peraturan daerah (raperda) tentang penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB). Raperda ini sebagai payung hukum untuk memberikan kemudahan layanan masyarakat yaitu uji berkala kendaraan dengan berbasis online.

Ketua Pansus Penyelenggaraan PKB H Ardi SAg MMPar MM mengatakan, raperda ini untuk mengubah Perda No. 2 Tahun 2005 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor. Dimana perda yang lama ini sudah tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan.

"Kementerian Perhubungan sudah mengharuskan, uji berkala kendaraan mulai tahun 2020 lalu harus sudah berbasis online. Sedangkan perda yang lama belum memuat itu," katanya.

Sebenarnya, lanjut Ardi, untuk Sleman pelaksanaan uji berkala kendaraan sudah berbasis online. Namun payung hukumnya di Sleman belum diubah. Untuk itu,



KR-Saifulah Nur Ichwan

**H Ardi SAg MMPar MM**

Pansus penyelenggaraan PKB sedang membahasnya perubahan perda yang lama.

"Saat ini kami sudah melakukan rapat dengan mitra kerja maupun mitra mitra dari pihak-pihak terkait. Hal ini untuk menyempurnakan raperda yang kami bahas," terangnya.

Tujuan dari pembahasan raperda penyelenggaraan PKB, tidak lain untuk mempermudah layanan masyarakat dalam uji berkala kendaraan. Dimana masyarakat dapat melaksanakan uji berkala

kendaraan dimana saja karena sudah menerapkan sistem online. "Untuk tahap awal, memang harus di tempat pembeliannya atau pemilik berdomisili. Tapi untuk uji berkalanya, bisa dimana saja dilakukan," ujarnya.

Dalam raperda ini juga lebih disempurnakan dari perda sebelumnya. Nanti akan ada klasifikasi kendaraan yang harus uji berkala seperti berkendaraan wisata jip. Dengan tujuan semua kendaraan jip wisata tetap layak jalan.

"Kendaraan wisata seperti jip harus layak jalan. Soalnya ini untuk melindungi keselamatan wisatawan yang menggunakan jasa jip. Harapannya tidak ada kecelakaan jip karena faktor kendaraan tak layak jalan," papar Ardi.

Di samping itu, nanti Dinas Perhubungan akan memberikan layanan gratis uji kelayakan kepada bus pariwisata yang akan melakukan perjalanan wisata. Hal ini juga bagian untuk melindungi keselamatan masyarakat. "Nanti bus pariwisata wajib lapor kalau mau perjalanan wisata. Kemudian dinas akan mengecek layak atau tidak kendaraan itu berjalan. Dan pengecekan ini gratis," tegas poltisi dari PAN ini.

Dengan adanya kemudahan dalam layanan uji berkala kendaraan ini, diharapkan kesadaran masyarakat uji berkala meningkat. Sehingga nanti akan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sleman. "Ketika layanannya mudah, kesadaran masyarakat juga meningkat. Otomatis PAD juga meningkat," pungkas anggota Komisi B DPRD Sleman ini. **(Sni)-f**

## RAPERDA PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR

### Pansus Usulkan 'Crisis Center of Disease'

**SLEMAN (KR)** - Panitia Khusus (Pansus) DPRD Sleman telah menggelar 5 kali rapat terkait penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pencegahan, Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Menular di Kabupaten Sleman. Pansus akan mengusulkan pembentukan 'Crisis Center of Disease' atau pusat pengendalian penyakit menular ini sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah.

"Kami usulkan pembentukan pusat pengendalian penyakit menular ini sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah dalam menanggulangi semua penyakit menular yang saat ini masih sulit dikendalikan serta manajemen risiko ketika hadirnya penyakit menular baru," kata Ketua Pansus Raperda Penyakit Menular dr Raudi Akmal, Rabu (18/8) usai rapat pansus.

Rapat digelar melalui virtual untuk membahas tentang isi dari draf raperda tersebut. Dalam dua rapat terakhir, tim pansus mengundang salah satu dosen Manajemen Kebencanaan UGM Dr Bevoala Kusumasari dan pakar ahli epidemiologi dr Riris Andono Ahmad.

Dengan situasi seperti ini, harus ada regulasi dan instansi yang mengatur dan memiliki wewenang untuk memberikan sinyal pembebasan bagaimana suatu keadaan dinyatakan normal dan berpotensi wabah. Hal ini berguna untuk merespons keadaan yang luar biasa seperti wabah, sehingga ketika situasi penyebaran penyakit menular hadir, mobilisasi resource bisa lebih cepat.

"Pembentukan suatu 'crisis center of disease' sebagai bentuk pe-



KR-Istimewa

**Raudi Akmal**

nanggulangan penyakit menular juga respons baik oleh dr Bevoala dengan catatan harus ada kejelasan terkait tugas dan wewenang tim ini, siapa saja yang menjadi sdmnya dan bagaimana sistemnya akan bekerja. Tujuannya agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dan keberadaannya benar-benar menjadi solusi untuk mengelola persoalan penyakit menular di Kabupaten Sleman," ujarnya.

Dikatakan Raudi, pusat peng-

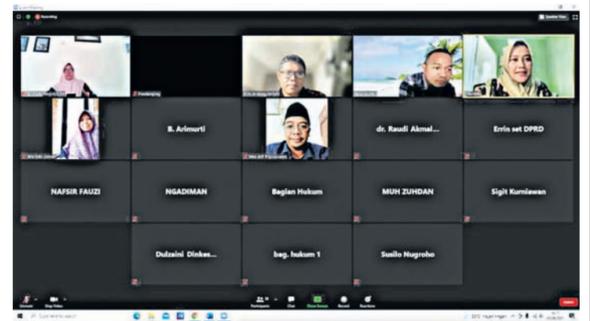
dalian penyakit menular ini nantinya berfungsi sebagai pusat penelitian untuk meningkatkan kesehatan dan keamanan publik dengan menyediakan informasi kesehatan, penelitian dan mempromosikan kesehatan dengan dinas kesehatan kabupaten serta organisasi lainnya. Pusat ini memfokuskan perhatiannya pada perkembangan, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, patogen bawaan makanan, kesehatan lingkungan, dan pendidikan untuk mewujudkan Sleman yang sehat.

"Ke depan kita inginkan penyakit menular yang ada maupun yang akan muncul tidak memakan banyak korban atau berubah menjadi wabah. Kehadiran raperda dan pusat pengendalian penyakit menular bertujuan untuk mencegah wabah, merespons secara cepat dengan mengedepankan data dan intelektualitas hingga menimbulkan shield capacity yang optimal. Pelaksanaan deteksi dini, surveilans dan pembuatan pedoman penanggulangan harus dilakukan sejak awal," kata Raudi. **(Sni)-f**



KR-Istimewa

**Ardi saat memimpin rapat pansus dengan mitra kerja.**



KR-Istimewa

**Pansus saat menggelar rapat virtual.**